

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengembangan Ekonomi Lokal**

Pengembangan ekonomi lokal menurut Blakely dan Bradshaw adalah proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses yang melibatkan pembentukan kelembagaan baru, perkembangan industri baru, pengembangan kapasitas pekerja untuk menghasilkan produk yang lebih bermutu, identifikasi pasar baru serta pendirian usaha-usaha baru. Sedangkan menurut World Bank (2001) adalah proses dimana para pelaku pembangunan, bekerja kolektif dengan mitra dari sektor publik, swasta dan non pemerintah, untuk menciptakan kondisi lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja (dalam Nurzaman, 2002).

Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal sangat penting, dalam hal ini pemerintah daerah berperan menjalankan fungsinya sebagai pelopor pengembangan, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Peranan pemerintah daerah juga sangat diperlukan dalam hal memperhatikan infrastruktur yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan industri, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Selain pemerintah daerah, peranan swasta dan kelompok masyarakat juga diperlukan dalam kegiatan manajemen wilayah dan pencarian

solusi atas permasalahan tertentu. Sementara itu, salah satu kebijaksanaan pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada prinsip keuntungan kompetitif, salah satunya melalui pengembangan potensi ekonomi daerah (Sjafrizal, 2008).

Potensi ekonomi daerah didefinisikan oleh Suparmoko (2002) sebagai “kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.”

Sumihardjo (2008) menjelaskan bahwa pengembangan sektor unggulan yang dimiliki daerah tercermin pada visi dan misi daerah yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana jangka menengah daerah (RPJMD). Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pengembangan potensi daerah yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan pada dasarnya adalah kunci keberhasilan pengembangan potensi ekonomi lokal untuk menguatkan daya saing daerah. Muktianto (2005) menjelaskan bahwa pendekatan yang umum dalam pengembangan potensi daerah dengan cara menelaah komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), komponen sumber daya manusia, teknologi dan sistem kelembagaan. (dikutip dari Sumiharjo, 2008, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.1 | 191 h.12). Dalam menelaah PDRB dilakukan untuk mengetahui potensi basis dan non basis. Suatu daerah yang memiliki keunggulan memberikan kekhasan tersendiri yang tidak ada pada daerah lain, sehingga sektor

unggulan tadi dapat dikatakan sebagai kegiatan basis (Triyuwono & Yustika, 2003).

Tarigan (2002) menjelaskan bahwa teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu kegiatan basis dan bukan basis. Kegiatan basis adalah mengekspor barang dan jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis adalah kegiatan yang tidak mengekspor, yakni hanya kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah itu sendiri.

Bertambah banyaknya kegiatan basis di dalam suatu daerah akan menambah permintaan terhadap barang dan jasa di dalamnya dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya, berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan dan turunnya permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis. Dengan demikian kegiatan basis ekonomi mempunyai peranan sebagai penggerak pertama (*primer mover rule*), sedangkan setiap perubahan mempunyai “efek multiplier” terhadap perekonomian regional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengetahui sektor basis dan bukan basis antara lain menggunakan metode analisis “*location quotient*” (LQ). (Triyuwono & Yustika, 2003).

Dengan mengetahui kegiatan basis disuatu daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya, maka dapat menguatkan daya saing daerah tersebut. Menurut

Abdullah (2002) “daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.” Indikator-indikator utama dan prinsip-prinsip penentu daya saing daerah salah satunya adalah perekonomian daerah. Prinsip-prinsip kinerja perekonomian daerah yang mempengaruhi daya saing daerah yakni :

- a. Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya jangka pendek.
- b. Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang.
- c. Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi dimasa lalu.
- d. Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik (dalam Hermayanti (2013)).

## **B. Pembangunan Pertanian**

Peran pertanian dalam pembangunan ekonomi hanya sebagai sumber tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah untuk mengembangkan sektor industri yang berfungsi sebagai unggulan dinamis dalam strategi pembangunan secara keseluruhan (Todaro, 2000). Perkembangan pembangunan pertanian tidak dapat terlaksana sendiri tanpa adanya dukungan dari semua bidang-bidang kehidupan nasional dimana kegiatan pertanian itu dilaksanakan. Ada tiga tahapan dalam perkembangan pembangunan pertanian, yaitu tahap pertama adalah pertanian

tradisional yang produktivitasnya rendah. Tahap kedua adalah penganekaragaman produk pertanian sudah ada yang dijual ke sektor komersial, tetapi pemakaian modal dan teknologi masih rendah. Tahap yang ketiga adalah tahap yang menggambarkan pertanian modern yang produktivitasnya sangat tinggi yang disebabkan oleh pemakaian modal dan teknologi yang tinggi (Arsyad, 1992).

Untuk memanfaatkan dan meningkatkan keunggulan sumber daya wilayah secara berkelanjutan dalam pembangunan pertanian, kebijaksanaan pembangunan pertanian harus dirancang dalam perspektif ekonomi wilayah. Saat ini rencana dan implementasi program-program yang disusun oleh daerah sudah menunjukkan perspektif ekonomi wilayah dalam kebijaksanaan pembangunan pertanian yang dirancangnya.

Dalam perspektif ini Pemerintah Pusat hanya merancang pelaksanaan yang bersifat makro, sedangkan Pemerintah Daerah merancang pelaksanaan pencapaian target sesuai dengan kondisi wilayah. Sehingga Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara maksimal dalam mengelola sumber daya spesifik lokal. Sebagai bahan perencanaan diperlukan analisis potensi wilayah baik dalam aspek biofisik maupun sosial ekonomi. Dalam pemanfaatan potensi tersebut peran serta masyarakat secara partisipatif perlu didorong dan dikembangkan (Sudaryanto, 2002).

### **C. Peranan Perkebunan**

Sektor perkebunan memiliki peranan yang sangat potensial di dalam dan di luar negeri. Di dalam negeri produk sektor perkebunan dapat dikonsumsi langsung

oleh masyarakat dan sebagai bahan baku industri. Dan bila diusahakan secara sungguh-sungguh atau profesional bisa menjadi suatu bisnis yang menjadikan keuntungan besar (Rahardi, 1993). Pembangunan sub sektor perkebunan terus digalakkan oleh pemerintah secara berangsur melalui program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup para petani atau pengebum dengan jalan pembukaan areal-areal baru yang kurang produktif di atas lahan kritis, serta menghentikan perladangan yang berpindah-pindah. Dengan proyek Perkebunan Inti Rakyat maka petani dapat menjual komoditas hasil kebunnya kepada pemerintah dengan harga pasaran ekspor serta kualitas komoditas yang terjamin standarnya (Departemen Penerangan, 1998).

Potensi ekspor untuk sub sektor perkebunan juga sangat besar. Tetapi diperlukan adanya perbaikan dan penyempurnaan iklim usaha dan struktur pasar komoditas perkebunan dari sektor hulu sampai ke hilir. Karena kinerja ekspor tidak akan menjadi lebih baik jika masih banyak hambatan yang dihadapi kegiatan pada sektor hulu, pola perdagangan dan distribusi komoditas perkebunan domestik (Arifin,2001).

#### **D. Aspek Ekonomi Perkebunan Kelapa Sawit**

Kelapa sawit (*Elaeis*) termasuk golongan tumbuhan palma. Penyebaran kelapa sawit di Indonesia terletak di daerah Aceh, pantai Timur Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Sawit menjadi populer setelah adanya Revolusi Industri pada akhir abad ke-19 yang meningkatkan permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan industri sabun (Kamaruddin, 2005). Buah (*fructus*) pada kelapa sawit dihasilkan

setelah tanaman berumur 3,5 tahun dan diperlukan waktu 5-6 bulan dari penyerbukan hingga buah matang dan siap dipanen (Fauzi, 2002).

Di dalam pengusaannya, perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Perkebunan Rakyat, Perkebunan Besar Negara, dan Perkebunan Besar Swasta. Perkebunan rakyat adalah perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh rakyat biasanya memiliki luas yang terbatas, yaitu 1-10 ha. Ini membuat hasil produksi TBS (Tandan Buah Segar) juga terbatas sehingga penjualan sulit untuk dilakukan jika ingin dijual langsung kepada industri pengolahan (Fauzi, 2012).

Kelapa sawit juga merupakan salah satu tanaman multiguna yang mulai menggantikan posisi penanaman pada komoditas perkebunan lain, yaitu tanaman karet (Suwanto, 2010). Hal ini membuat kelapa sawit menjadi salah satu komoditi unggulan dan banyak dibudidayakan. Menurut Tim Bina Karya Tani (2009), kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan penghasil minyak nabati yang paling banyak, sehingga tanaman ini mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Tingginya prospek pengembangan perkebunan kelapa sawit baik secara daerah maupun nasional menyebabkan tumbuh dan berkembangnya sistem agribisnis kelapa sawit. Prinsip dasar dalam usaha perkebunan kelapa sawit adalah dengan memproduksi produk dengan biaya serendah-rendahnya dan meningkatkan produktivitas serta kualitas setinggi-tingginya sehingga produk dapat diterima. Faktor yang menjadi pertimbangan ekonomis pada permintaan kelapa sawit

biasanya adalah kualitas dan ketersediaan produk karena produk yang dihasilkan produsen kelapa sawit bersifat homogen.

Dalam meningkatkan efisiensi biaya dalam produksi kelapa sawit diperlukan adanya skala ekonomi dimana faktor yang mempengaruhi skala usaha untuk perluasan perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut :

1. Jangka waktu tanaman kelapa sawit mulai menghasilkan TBS
2. Jangka waktu produktif tanaman kelapa sawit
3. Biaya investasi kebun untuk mencapai skala ekonomi
4. Sifat TBS yang setelah dipanen harus segera diolah di PKS karena mutunya akan menurun jika sempat menginap (*restan*) di lapangan
5. Adanya bulanan produksi puncak (*peak months*) yang menyebabkan penyebaran produksi TBS tidak merata. (Pahan, 2006)

Menurut Antoni (dalam Panggabean, dkk), biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi kelapa sawit mencakup :

1. Biaya investasi awal, seperti : pembukaan lahan, biaya bibit, serta biaya pemeliharaan sebelum tanaman menghasilkan.
2. Biaya pemeliharaan tanaman, seperti : pemberantasan gulma, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, tunas pokok (*pruning*), konsolidasi, pemeliharaan terasan dan tapak kuda, pemeliharaan prasarana.
3. Biaya panen atau biaya yang diperlukan untuk melancarkan segala aktivitas untuk mengeluarkan produksi (TBS) atau hasil panen dari lapangan (areal) ke agen pengepul atau pabrik seperti biaya tenaga kerja panen, biaya pengadaan alat kerja dan biaya angkutan.

Kelapa Sawit telah menjadi salah satu komoditi unggulan perkebunan, dan pengembangannya akan terus diupayakan sejalan dengan perkembangan atau pertumbuhan permintaan, baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor. Tingginya konsumsi domestik dan besarnya permintaan untuk ekspor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas kelapa sawit.

Komoditas kelapa sawit yang memiliki berbagai macam kegunaan baik untuk industri pangan maupun non pangan, prospek pengembangannya tidak saja terkait dengan pertumbuhan permintaan minyak nabati dalam negeri namun juga di dunia (Pahan, 2006). Keseimbangan penawaran dan permintaan MKS (minyak kelapa sawit) Indonesia menunjukkan peran Indonesia yang semakin dominan sebagai negara yang mempengaruhi pola penawaran dan permintaan minyak kelapa sawit dunia. (Mangoensoekarjo dan Samangun, 2003).

#### **E. Konsep *Multiplier Effect***

*Multiplier effect* adalah suatu konsep yang menjelaskan tentang suatu dampak dari suatu kegiatan yang menyebabkan munculnya kegiatan lain. Ada beberapa pandangan yang berbeda-beda mengenai konsep *multiplier effect* kajian dampak-dampak dalam pengembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Menurut Tarigan *multiplier effect* dapat terjadi apabila ada satu sektor yang diakibatkan oleh permintaan dari luar wilayah produksinya meningkat, karena ada keterkaitan tertentu membuat banyak sektor lain juga akan meningkat produksinya dan akan terjadi beberapa kali putaran pertambahan sehingga total

kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat dibanding dengan kenaikan permintaan dari luar untuk sektor tersebut.

Tetapi tidak semua pertumbuhan usaha dapat memberikan dampak yang positif tetapi akan ada juga dampak negatif yang ditimbulkan. Jumlah lapangan kerja, tingkat pendapatan yang diperoleh dan PDRB merupakan dua basis yang digunakan dalam mengukur adanya *multiplier effect*. Selain bidang ekonomi, pengukuran *multiplier effect* juga memasukkan bidang lain diluar ekonomi, seperti bidang sosial, karena dampak di bidang ekonomi akan berakibat pada bidang lain jika terjadi peningkatan dan penurunan dalam kegiatan ekonomi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan ekonomi lokal *multiplier effect* adalah suatu keterkaitan langsung dan tidak langsung yang kemudian mendorong adanya kegiatan pembangunan yang diakibatkan oleh kegiatan pada bidang tertentu baik itu positif maupun negatif yang menggerakkan kegiatan di bidang-bidang lain. Bidang-bidang tersebut disederhanakan menjadi dua yaitu bidang ekonomi dan sosial.

a. Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi *multiplier effect* dapat dilihat dari PDRB, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, adanya keterkaitan antar sektor yang diakibatkan karena pertambahan permintaan terhadap produksi pada sektor tertentu (Tarigan, 2002). Tetapi ada efek negatif yang bisa ditimbulkan dari perkembangan industri tersebut yaitu *spread effect* dimana perpindahan pekerja yang dibeli industri tersebut yang akan mempengaruhi pendapatan personal dari

masyarakat, sehingga memberikan dampak negatif bagi daerah yang mereka tinggalkan.

b. Bidang Sosial

Secara langsung atau tidak langsung dampak sosial yang akan ditimbulkan dari *multiplier effect* adalah pengaruh pada tingkat kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat seperti kemudahan akses layanan pendidikan dan kesehatan dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Tetapi, di sisi lain Marshall (1920) menyatakan ada dampak negatif di bidang sosial adanya perkembangan industri di suatu daerah yaitu menjadikan penduduk lebih konsumtif serta kualitas lingkungan hidup yang terancam karena eksploitasi bahan baku secara besar-besaran.

Charles M. Tiebout dalam makalahnya berjudul *The Community Economic Base Study* (1962) menggunakan perbandingan dalam bentuk pendapatan (*income*) dan membuat rincian yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang terkait dengan pengganda basis. Menurut Tarigan (2005), pengganda basis merupakan suatu metode untuk melihat besarnya pengaruh kegiatan ekonomi basis terhadap peningkatan total pendapatan di suatu wilayah. Dalam menggunakan ukuran pendapatan, nilai pengganda basis adalah besarnya kenaikan pendapatan seluruh masyarakat untuk setiap satu unit kenaikan pendapatan di sektor basis.

Menurut Tiebout dalam Tarigan (1962) hubungan antara perubahan pendapatan basis dengan perubahan total pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\Delta Y_t = K \cdot \Delta Y_b$$

Dimana :  $Y_t$  = Pendapatan total (*total income*)

$Y_b$  = Pendapatan basis

$Y_n$  = Pendapatan non basis

$K$  = Pengganda basis

$\Delta$  = Perubahan pendapatan

Adapun pengganda basis dalam satuan pendapatan adalah :

$$\text{Pengganda basis} = \frac{\text{Pendapatan total}}{\text{Pendapatan basis}} \text{ atau dalam bentuk simbol } K = \frac{Y_t}{Y_b}$$

Selanjutnya menurut Tiebout perekonomian terdiri atas tiga sektor, yaitu sektor ekspor (X), sektor investasi (I), dan sektor konsumsi (C). Total pendapatan wilayah adalah penjumlahan dari ketiga sektor tersebut dengan catatan apabila seluruh kegiatan menggunakan bahan baku lokal. Namun diketahui bahwa pengeluaran untuk konsumsi dan pengeluaran untuk investasi tidak seluruhnya menggunakan bahan baku lokal. Pendapatan dari konsumsi ( $C_r$ ) adalah pendapatan nonbasis karena besarnya ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Pendapatan dari ekspor adalah pendapatan basis begitu pula pendapatan untuk investasi ( $I_r$ ). Besarnya investasi bukan ditentukan oleh pendapatan masyarakat saat ini, melainkan berdasarkan keputusan masa lalu dan harapan di masa yang akan datang.

Perubahan pendapatan basis akan merubah pendapatan non basis, hal ini bisa terjadi karena pendapatan yang diperoleh masyarakat dari kegiatan ekspor dan investasi akan digunakan untuk konsumsi. Konsumsi yang berasal dari produk lokal akan menaikkan pendapatan nonbasis. Sedangkan konsumsi yang dibelanjakan di luar wilayah atau dikirim ke luar wilayah merupakan kebocoran yang akan mengurangi kekuatan permintaan akan produk lokal.

Untuk mendapatkan analisis yang lebih mendetail tentang tiga sektor yang mempengaruhi pendapatan wilayah, selanjutnya digunakan simbol-simbol yang lebih sederhana tanpa mengubah sasaran dari perumusan Tiebout. Dalam rangka penyederhanaan rumus tersebut maka diperoleh rumus baru untuk menghitung pengganda basis sebagai berikut (Tarigan 2005).

$$K = \frac{1}{1 - (c) \cdot (cr)}$$

K = Pengganda basis (*base multiplier*)

C = Proporsi untuk konsumsi

Cr = Proporsi konsumsi yang menggunakan produk lokal

Secara ekonomi, penyebut pada persamaan pengganda basis akan selalu lebih kecil dari satu sehingga pengganda basis tersebut akan selalu lebih besar dari satu. Hasil dari pengganda basis tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap tambahan pendapatan wilayah yang berasal dari peningkatan ekspor dari kegiatan basis dan/atau penambahan investasi akan menaikkan pendapatan wilayah.

## F. Penelitian Terkait

**Tabel 4 Penelitian Terkait**

No	Judul	Penulis	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap <i>Multiplier Effect</i> Ekonomi	Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP	Menggunakan pendekatan penciptaan <i>multiplier effect</i> dan indeks pertumbuhan kesejahteraan sosial	Kegiatan perkebunan kelapa sawit menciptakan <i>multiplier effect</i> sebesar 2,48 dan meningkatkan indeks pertumbuhan

Lanjutan Tabel 4

	Pedesaan di Daerah Riau			kesejahteraan petani pada tahun 2003 sebesar 1,74 persen
2.	<i>Multiplier Effect</i> Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah melalui Industri Kerajinan Anyaman Pandan di Kabupaten Kebumen	Hidayat Chusnul Chotimah	Menggunakan pendekatan positivis dengan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data dan informasi	Industri kerajinan anyaman pandan memberi efek positif dan negatif di bidang ekonomi dan sosial.
3.	Analisis Dampak Ekonomi Wisata Bahari Terhadap Pendapatan Masyarakat di Pulau Tidung	Achadiat Dritasto, dan Annisa Ayu Anggraeni	Menggunakan <i>Keynesian Income Multiplier</i> dengan melihat dampak langsung, dampak tidak langsung, dan dampak lanjutan.	Keberadaan wisata di Pulau Tidung telah memberikan dampak ekonomi terbukti dari nilai <i>Keynesian Income Multiplier</i> sebesar 0,28, Nilai <i>Ratio Income Multiplier I</i> sebesar 1,35, dan Nilai <i>Ratio Income Multiplier Tipe II</i> sebesar 1,59
4.	Analisis Keterkaitan dan Dampak Pengganda Sektor Perikanan pada Perekonomian Jawa Tengah : Analisis Input Output	Abdul Kohar Mudzakir dan Agus Suherman	Analisis data dilakukan dengan menggunakan matematika ekonomi dan model input output yang dibantu dengan program Excel dan GRIMP 7.1	Analisis keterkaitan langsung sektor perikanan menunjukkan bahwa sektor ini mempunyai keterkaitan output langsung ke

Lanjutan Tabel 4

---

belakang lebih  
besar daripada  
ke depan. Pada  
hasil  
pengganda tipe  
I dan II didapat  
nilai  
pengganda  
output,  
pendapatan  
dan tenaga  
kerja sektor  
perikanan  
masih kecil

---